

ORANG TIONGHOA DALAM SEJARAH NUSANTARA DAN NKRI

Oleh: Edwin Ligasetiawan

Orang Tionghoa terutama di Indonesia bagaikan orang Yahudi di Eropa atau khususnya Jerman pada masa pemerintahan Nazi. Orang Tionghoa dicap sebagai orang kaya dan pelit yang berusaha menghisap kekayaan Indonesia untuk keuntungannya sendiri. Mereka dimusuhi dan tidak dianggap sebagai bagian dari Republik Indonesia. Mereka bagaikan memiliki dosa asal karena terlahir sebagai Tionghoa di Indonesia. Mereka dianggap rakus akan uang dan tidak mau berbaur dengan penduduk yang katanya “asli” yang mungkin hanya datang lebih dulu datang ke tanah yang bernama Indonesia. Mengapa mereka bisa terlihat lebih kaya? Sebab mereka bekerja keras dalam hidup. Mental kerja keras itu sudah didapat dari tanah leluhurnya yang terus rusuh mulai dari bencana, perang, dan serbuan bangsa “barbar”, sehingga mereka keluar dari tanahnya untuk hidup yang lebih layak. Hidup sebagai perantau jauh lebih berat, oleh karena itu orang-orang Tionghoa lebih ekstra dalam menghadapi segala hal. Dan ingat tidak semua orang Tionghoa di Indonesia kaya, banyak dari mereka juga miskin dan tertindas seperti di Tangerang dan Kalimantan Barat. Jangan lupa pula bahwa keberadaan orang Tionghoa di Nusantara sudah sangat lama bahkan mereka sudah ada di tanah ini sebelum Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara berdiri, walaupun tidak bisa dibilang lebih lama dari orang-orang yang mendirikan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kemudian karena gelombang kedatangan orang-orang Tionghoa ke Nusantara pada abad-abad 18 dan 19-lah mengapa mereka dicap sebagai pendatang.

Masuknya Orang Tionghoa ke Nusantara

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan menjadi daya tarik dunia perdagangan sejak ratusan tahun yang lalu. Kekayaan Indonesia dan ramainya jalur perdagangan laut di wilayah Nusantara menjadikan wilayah Indonesia banyak dikunjungi oleh berbagai bangsa terutama dari Tiongkok, Arab, dan India. Menurut beberapa catatan tertua yang ditulis oleh para agamawan, seperti Fa Hien pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-7, sudah ada beberapa orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia terutama untuk belajar agama.

Seiring dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan di Nusantara menyebabkan semakin banyak orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia selain untuk berdagang mereka juga menetap di wilayah-wilayah kerajaan di nusantara. Pergerakan orang-orang Tionghoa dari Tiongkok ke Indonesia secara besar terjadi pada abad ke-13 pada saat Kaisar Dinasti Yuan, Kublai Khan, menyerbu Jawa untuk mengalahkan Kerajaan Singhasari, tetapi setelah itu tentara Tiongkok dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit. Banyak dari mereka akhirnya tidak kembali ke Tiongkok dan memilih untuk menetap di Pulau Jawa.

Perkembangan selanjutnya pada abad ke-15 ketika Kaisar Dinasti Ming mengirim armada ke Indonesia di bawah komando Laksamana Cheng Ho, dan banyak dari pengikutnya memilih menetap di Pulau Jawa khususnya kota Semarang. Cheng Ho juga mencatat bahwa pada saat kedatangannya juga sudah banyak orang-orang Tionghoa yang menetap di ibukota

dan kota-kota bandar Majapahit yang membentuk 3 komponen penduduk kerajaan tersebut. Di kota Semarang dibangunlah Kelenteng Sam Po Kong.

Sejumlah sejarawan juga menunjukkan bahwa Raden Patah alias Jin Bun, pendiri Kesultanan Demak, memiliki darah keturunan Tionghoa selain darah dari raja Majapahit. Begitu pula dengan beberapa wali penyebar agama Islam di Jawa juga memiliki darah keturunan Tiongkok. Pada masa itu sangat banyak orang Tionghoa yang memeluk agama Islam terutama di daerah pesisir pulau Jawa dan mereka tidak lagi secara aktif mempraktikkan kebudayaan Tionghoa.

Jadi, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, bangsa Tionghoa sudah menetap secara permanen di Indonesia dan sudah berasimilasi dengan kebudayaan lokal. Mereka hidup rukun berdampingan dengan penduduk pribumi. Kebanyakan mereka bekerja sebagai pedagang dan sebagian kecil bekerja sebagai pekerja kasar yang didatangkan oleh kerajaan di Nusantara dari negeri Tiongkok.

Orang Tionghoa pada Masa Penjajahan Bangsa Eropa: Penjajahan oleh VOC

Sejarah Indonesia memasuki babak baru yaitu dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang dimulai oleh Portugis dan Spanyol dan kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris, dan Perancis. Pada masa VOC (kongsi dagang Belanda) berkuasa di Indonesia, mereka mulai menerapkan aturan-aturan yang menyiksa dan menyusahkan orang-orang yang sudah tinggal di Indonesia baik pribumi maupun Tionghoa. Pada saat itu banyak orang Tionghoa khususnya di Batavia yang bekerja sebagai buruh pabrik di pabrik-pabrik gula milik VOC, tukang bangunan, pedagang, dan pemilik toko.

Pada tahun 1740 terjadi berbagai masalah yang berkaitan dengan orang Tionghoa sebab adanya peraturan-peraturan diskriminatif yang dikeluarkan VOC. Berbagai kebijakan diskriminatif dan juga masalah yang timbul terkait dengan orang Tionghoa antara lain pertama, setiap orang Tionghoa wajib memiliki surat identifikasi jika tidak maka akan dideportasi ke Tiongkok. Kedua, Komisaris Urusan Orang Pribumi Roy Ferdinand, atas perintah Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier memutuskan sejak tanggal 25 Juli 1740 setiap orang Tionghoa yang mencurigakan akan dibuang ke Sri Lanka dan dipaksa menjadi petani kayu manis. Ketiga, tersebar desas-desus bahwa orang yang dibuang ke Sri Lanka tidak akan pernah sampai melainkan akan dibuang ke laut. Keempat, Orang Tionghoa yang kaya diperas oleh penguasa Belanda untuk membayar sejumlah uang atau dideportasi. Kelima, banyak orang Tionghoa miskin yang bekerja sebagai buruh pabrik gula dimanfaatkan oleh penguasa VOC. Keenam, harga gula di Hindia Belanda jatuh. Ketujuh, keputusan Gubernur Jenderal Valckenier untuk menindak tegas dengan kekuatan yang mematikan kepada orang Tionghoa yang membuat rusuh. Hal-hal seperti itu membuat orang Tionghoa menjadi resah.

Karena terjadi keresahan tersebut mereka berusaha untuk melawan penguasa VOC. Setelah buruh pabrik gula keturunan Tionghoa memberontak dengan membakar dan menjarah pabrik gula, pada 7 Oktober 1740 ratusan orang Tionghoa di bawah komando Kapitan Tionghoa Ni Hoe Kong membunuh 50 pasukan Belanda di Meester Cornelis dan

Tanah Abang, Batavia. VOC mengirim 1.800 tentara untuk memadamkan pemberontakan dan pasukan Belanda berhasil mengalahkan serangan ribuan orang Tionghoa pada esok harinya. Akhirnya pada 9 Oktober 1740, VOC mulai menembaki rumah-rumah orang Tionghoa dengan Meriam. Semua orang Tionghoa ditembaki saat mereka melarikan diri. Mereka yang berhasil mencapai kanal untuk menyelamatkan diri dibantai oleh pasukan VOC yang sudah menunggu dengan perahu kecil, bahkan sampai pasien rumah sakit yang orang Tionghoa dibawa ke luar untuk dibunuh. Akibat pembantaian ini tak kurang dari 10.000 orang Tionghoa terbunuh. Pembantaian tidak hanya terjadi di Batavia tapi juga menjalar ke Semarang, Surabaya, dan Gresik.

Sisa pasukan Tionghoa yang selamat di bawah pimpinan Khe Pan Djang (Sepanjang/Tay Wan Soey) melarikan diri ke pesisir Jawa, mereka diterima dan didukung oleh pasukan Jawa di bawah pimpinan Sultan Mataram Pakubuwana II untuk terus berjuang melawan VOC. Perang ini berlanjut dengan Perang Jawa tahun 1741-1743, di mana laskar Tionghoa di bawah pimpinan Khe Pan Djang bersatu dengan pasukan Kesultanan Mataram (kemudian menjadi Kesunanan Surakarta) di bawah pimpinan Sultan Pakubuwana II berperang melawan VOC. Perang ini menyebabkan hampir berhasil diusirnya VOC dari tanah Jawa. Tetapi VOC mendapat bantuan dari Pangeran Cakraningrat IV dari Madura (yang akhirnya dikhianati oleh Belanda, kemudian bergabung dengan pemberontak) dan bantuan pasukan dari Ambon dan Sulawesi berhasil mengalahkan gabungan pasukan Jawa-Tionghoa, di mana akhirnya Sunan Pakubuwana II menyerah pada VOC tahun 1742 dan perjuangannya dilanjutkan oleh Amangkurat V. Di samping itu juga terjadi Perang Kuning (bagian dari Perang Jawa) yang dimulai di Lasem yang juga merupakan gabungan pasukan Jawa-Tionghoa melawan VOC di bawah komando Oei Ing Kiat, Tan Kee Wie, dan Raden Panji Margono. Gabungan pasukan ini berhasil mengusir VOC di beberapa kota dan mengepung Kota Semarang, sebelum kemudian Belanda mendapatkan bantuan dan berhasil memenangkan pertempuran Semarang. Selain itu juga terdapat nama Singseh alias Tan Sin Ko yang bersama Raden Mas Said (Mangkunegara I) yang bertempur di Welahan melawan pasukan VOC. Keseluruhan Perang Jawa ini kemudian berhasil dimenangkan oleh VOC dengan bantuan pasukan dari luar pulau Jawa dan dengan persenjataan yang lebih mumpuni.

Dari sejarah pembantaian orang Tionghoa di Batavia, Semarang, Surabaya, dan Gresik sudah jelas bahwa orang Tionghoa bernasib sama dengan pribumi lainnya mereka didiskriminasi dan diperlakukan kejam oleh penjajah. Hal ini menyebabkan mereka mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Di sini dapat disaksikan bahwa orang Tionghoa juga ikut berkontribusi dalam perang melawan penjajah.

Setelah peristiwa berdarah ini yang memiliki dampak besar dalam pemisahan penduduk Hindia Belanda antara orang Tionghoa dan pribumi. Oleh penguasa VOC, orang Tionghoa hanya diperbolehkan tinggal di satu tempat tertentu dan jika ingin keluar wilayah tersebut harus memiliki izin (semacam paspor). Hal ini melahirkan banyak kampung-kampung Tionghoa yang disebut Pecinan (*Chinatown*). Secara praktis kehidupan orang Tionghoa menjadi terpisah dengan kehidupan pribumi lainnya. Usaha VOC ini berhasil untuk memisahkan orang Tionghoa dengan pribumi lainnya dengan membuat Pecinan tersebut,

mereka saling diadu domba agar tidak sepeham. VOC takut jika orang Tionghoa dan pribumi bersatu kembali dan memberontak.

Republik Lanfang

Sejarah orang Tionghoa di negeri ini sangat panjang salah satunya adalah sejarah yang cukup penting tapi banyak orang tidak mengetahuinya, yaitu sejarah mengenai Republik Lanfang, republik pertama di Asia. Negara republik pertama di Asia ini ada di Indonesia tepatnya di Kalimantan Barat sekarang ini. Pada awalnya terdapat wilayah-wilayah pertambangan emas di Kalimantan Barat yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Sambas. Untuk mengelola tambang-tambang emas tersebut, Sultan Sambas mendatangkan para pekerja dari negeri Tiongkok yang kebanyakan orang Hakka. Lambat laun berdiri kongsi-kongsi dagang di antara para pekerja tambang tersebut. Kongsi-kongsi dagang ini mengatur pertambangan yang mereka kelola dan mereka tunduk dengan membayar upeti kepada Sultan Sambas. Salah satu kongsi dagang yang besar dan kuat adalah Kongsi Lanfang yang dipimpin oleh Lo Lan Pak (Luo Fangbo) yang didirikan pada tahun 1777.

Pada tahun 1778 ketua Kampung Pontianak mengangkat diri menjadi Sultan Pontianak pertama dan mendirikan Kesultanan Pontianak. Karena wilayah kerja Kongsi Lanfang berada di muara sungai yang dikuasai oleh Sultan Pontianak, maka mereka akhirnya lebih dekat dengan Sultan Pontianak dibandingkan dengan Sultan Sambas. Seiring semakin besar dan kuatnya Kongsi Lanfang mereka diberikan otonomi khusus dari Sultan Pontianak untuk mengatur wilayahnya sendiri. Kongsi ini kemudian berubah menjadi sebuah Republik yang terpisah dari kekuasaan lain dan mandiri. Republik Lanfang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang sangat demokratis karena terdiri dari tiga badan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mereka juga memiliki sistem hukum, perbankan, dan mata uang sendiri. Republik ini juga memiliki kementerian pertahanan dan tentara dengan tujuan untuk mempertahankan republik bukan untuk perang. Republik ini diperintah oleh seorang presiden yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum oleh setiap warga republik. Selama 107 tahun berdirinya Republik Lanfang, tidak kurang ada 13 presiden yang pernah menjabat.

Republik ini juga memiliki sistem birokrasi dan pembagian pejabat tinggi dan rendah, mereka berasal dari banyak kalangan. Tetapi yang hanya bisa dipilih menjadi presiden hanya mereka yang keturunan Tionghoa Hakka. Republik ini secara *de facto* ada dan benar sebagai sebuah negara yang independen tetapi karena waktu itu hubungan internasional belum maju, tidak ada yang mengakui secara *de jure* republik ini kecuali kesultanan di sekitar Republik Lanfang. Republik ini juga selalu melapor dan membayar upeti kepada Dinasti Qing yang berkuasa di Tiongkok.

Ekspansi Pemerintah Hindia Belanda di Pulau Kalimantan membawa Republik Lanfang ke dalam perang melawan Belanda. Setidaknya ada beberapa perang yang dihadapi oleh orang-orang Tionghoa di Kalimantan melawan Belanda. Perlawanan ini adalah perlawanan yang pertama di pulau Kalimantan melawan Belanda yang terjadi pada tahun 1823. Kemudian diikuti dengan perlawanan lainnya tahun 1850-1854, 1854-1855, dan 1884-1885. Perlawanan terakhir pada tahun 1884-1885 yang berkobar di ibukota Lanfang, Dong

Wanli (sekarang Mandor), menandakan berakhirnya Republik Lanfang akibat invasi Belanda secara besar-besaran. Tetapi secara formal Belanda tidak pernah mengakui menduduki wilayah Lanfang dan Belanda membuat pemerintahan boneka dengan para petinggi Republik Lanfang sebagai pengurusnya, hal ini dilakukan Belanda karena takut akan marahnya Dinasti Qing. Belanda baru mengumumkan menduduki wilayah Lanfang pada tahun 1912 saat setelah Dinasti Qing di Tiongkok runtuh.

Orang Tionghoa pada Masa Penjajahan Bangsa Eropa: Pemerintahan Hindia Belanda

Setelah pemberontakan, pembantaian orang Tionghoa, dan perang Jawa yang merupakan gabungan antara pasukan Jawa dan Tionghoa, Belanda semakin memisahkan kedua bangsa ini (terutama Tionghoa yang dipisahkan dari pribumi lainnya). Pada tahun 1799, VOC bankrut akibat korupsi yang merajalela dan setelah itu seluruh wilayah dan aset VOC diambil alih menjadi milik pemerintah Kerajaan Belanda. Memasuki abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda membuat politik pembagian golongan di mana penduduk Hindia Belanda dibedakan menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing (Tionghoa, Arab, India), dan golongan Pribumi. Walaupun dipisahkan tetapi hubungan antara orang Tionghoa dan Pribumi lainnya tetap berjalan terutama dalam bidang perdagangan. Di samping itu juga dengan bertambah banyaknya kembali orang-orang Tionghoa yang tinggal di kota-kota di Hindia Belanda. Belanda melihat bahwa orang Tionghoa bisa dijadikan manfaat sebagai mitra dagang sekaligus menjadi perantara untuk mengubungkan antara pedagang Belanda dengan pedagang Pribumi.

Karena keahliannya dalam berdagang dan manfaat yang didapat dengan keberadaannya, orang Tionghoa ini oleh Pemerintah Hindia Belanda dinaikan statusnya dari kelompok masyarakat kelas dua (golongan Timur Asing) menjadi kelompok masyarakat kelas satu setara dengan orang Belanda. Sedangkan orang Pribumi tetap dianggap sebagai kelompok masyarakat kelas tiga. Pemisahan dan pengkhususan yang dilakukan oleh orang Belanda terhadap orang Tionghoa (*privilege*) menjadikan orang Tionghoa dianggap sebagai sekutu erat Belanda oleh orang Pribumi. Selain itu juga karena kesenjangan ekonomi yang besar antara orang Tionghoa dan Pribumi semakin menimbulkan prasangka buruk terhadap orang Tionghoa. Padahal di Hindia Belanda juga masih banyak orang-orang Tionghoa yang hidup miskin dan tertindas bahkan sampai saat ini seperti di Tangerang dan Kalimantan Barat.

Timbulnya prasangka buruk dan sikap anti-Tionghoa di Jawa terlihat pada saat meletusnya Perang Diponegoro (1825-1830). Pada perang tersebut masyarakat Tionghoa dijadikan musuh karena banyaknya kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang merugikan orang Pribumi sedangkan karena status khusus yang diberikan oleh Belanda kepada orang Tionghoa membuat mereka untung (walau hanya sebagian kecil orang Tionghoa kaya saja yang untung) dan serangkaian peristiwa yang terjadi di mana tidak bisa bersatunya orang Tionghoa dan orang Jawa.

Penyerangan terhadap orang Tionghoa di Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi semenjak awal peperangan. Catatan Payen, seorang arsitek di Yogyakarta, menyatakan

bahwa komunitas Tionghoa di Yogyakarta dibantai tanpa memperdulikan wanita maupun anak-anak. Komunitas Tionghoa di Bagelen sempat bertahan sampai tahun 1827 sebelum akhirnya dipindahkan ke Wonosobo. Meskipun demikian, masyarakat Tionghoa di pesisir pantai utara (sekitar Tuban dan Lasem) ikut memasok pasukan Diponegoro dengan senjata, uang, dan opium (pada masa tersebut penduduk Jawa banyak yang kecanduan opium, termasuk pasukan Diponegoro). Setelah perang berakhir, kerukunan antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat lain di Jawa tidak dapat kembali seperti semula karena timbulnya rasa saling curiga akibat trauma selama perang, misalnya peristiwa di Bagelen saat penduduk Jawa Pribumi meminta masyarakat Tionghoa yang mengungsi agar kembali.

Pada masa ini masyarakat Tionghoa menjadi sasaran kekerasan dalam perang dari kaum Pribumi, di samping sebagian lagi berkontribusi membantu masyarakat Jawa Pribumi dalam perang melawan Belanda. Dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa politik adu domba Belanda cukup berhasil. Jika kita melihat pada sejarah maka titik tolak dari munculnya perselisihan antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Pribumi terjadi setelah peristiwa pembantaian dan pemberontakan orang Tionghoa di Batavia (Geger Pecinan). Sejak itu orang Tionghoa mulai dipisahkan kehidupannya dari Pribumi lainnya sehingga menimbulkan ketidakharmonisan komunikasi antara dua golongan ini.

Masa Kebangkitan Nasional

Sejarah Indonesia memasuki babak baru dengan lahirnya banyak kaum terpelajar akibat Politik Etis pemerintah Hindia Belanda. Politik Etis ini merupakan jawaban Pemerintah Hindia Belanda atas kritikan keras Multatuli dalam bukunya Max Havelaar atas kekejaman kolonialisme Belanda di Hindia Belanda. Politik Etis ini menghasilkan perubahan nyata dengan mulai dibangunnya sekolah-sekolah untuk kaum Pribumi dan perbaikan irigasi, pertanian, dan dalam bidang lainnya. Awalnya pendidikan hanya untuk kaum elite Pribumi saja (tidak termasuk Pribumi biasa) dan untuk orang Tionghoa diabaikan. Padahal orang Tionghoa membayar pajak ganda (pajak penghasilan dan pajak kekayaan). Maka masyarakat Tionghoa mendirikan Tiong Hoa Hwee Kuan (THHK) pada tahun 1900 di Batavia yang mendirikan sekolah-sekolah dengan maksud agar orang Tionghoa bisa pintar, kemudian jumlahnya mencapai 54 buah sekolah pada tahun 1908 dan mencapai 450 sekolah pada tahun 1934. Inisiatif ini diikuti oleh etnis lainnya, seperti keturunan Arab yang mendirikan Djamiatul Chair yang meniru model THHK. Selanjutnya hal ini menyadarkan priyayi Jawa tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda sehingga dibentuklah Budi Utomo pada 20 Mei 1908.

Dalam bidang perekonomian orang-orang Tionghoa juga berpengaruh dalam pendirian kongsi-kongsi dagang dan serikat dagang yang diikuti oleh kalangan lain. Hal ini terlihat seperti berdirinya Sarekat Dagang Islam tahun 1909 di Buitenzorg yang mengikuti model Siang Hwe (kamar dagang Tionghoa) yang didirikan tahun 1906 di Batavia.

Pemerintah kolonial Belanda semakin khawatir sejak Sun Yat-sen memproklamasikan Republik Tiongkok pada Januari 1912. Organisasi Tionghoa yang pada mulanya berkecimpung dalam bidang sosial-budaya mulai mengarah kepada politik. Tujuannya untuk

menghapus perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda dalam bidang pendidikan, hukum dan/atau peradilan, status sipil, beban pajak, hambatan bergerak, dan bertempat tinggal. Hambatan untuk bergerak bagi orang Tionghoa disebabkan karena adanya *passenstelsel* yaitu peraturan yang mengharuskan orang Tionghoa membawa kartu *pass* jalan ketika mengadakan perjalanan keluar daerah, yang berlaku sejak 1816. Bagi mereka yang tidak mendaftarkan diri dan kedatangan tidak membawa kartu tersebut dalam perjalanan dikenai sanksi hukuman atau denda 10 gulden.

Sejak politik etis terlaksana dan pendidikan golongan lain selain Pribumi berkembang, melahirkan banyak kaum terpelajar. Kaum terpelajar ini mendorong lahirnya pergerakan nasional untuk merumuskan identitas Kebangsaan Indonesia yang dikenal dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pada waktu terjadinya Sumpah Pemuda, ada beberapa nama dari kelompok Tionghoa sempat hadir, seperti Kwee Tiam Hong dan tiga pemuda Tionghoa lainnya. Sumpah Pemuda dibacakan di rumah milik Sie Kok Liong yang disewakan kepada para pemuda untuk kos dan sebagai kantor PPPI. Koran Sin Po yaitu koran Melayu Tionghoa juga sangat banyak memberikan sumbangan dalam menyebarkan informasi nasionalis. Pada tahun 1920-an, koran Sin Po memelopori penggunaan kata Indonesia bumiputera menggantikan kata Belanda inlander di semua penerbitannya. Perubahan ini kemudian diikuti oleh banyak koran lainnya. Sebagai balas budi, semua pers lokal kemudian mengganti kata "Tjina" menjadi kata "Tionghoa". Koran Sin Po juga merupakan koran pertama yang berani menyebarkan lagu Indonesia Raya karangan W.R. Supratman pada tahun 1928.

Masa Kemerdekaan dan Revolusi Nasional Indonesia

Menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dibentuklah BPUPKI sebagai badan yang bertugas untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia seperti menyusun dasar negara UUD dan lain sebagainya. Dalam BPUPKI terdapat empat orang Tionghoa yaitu Liem Koen Hian, Tan Eng Hoa, Oey Tiang Tjoe, dan Oey Tjong Hauw. Dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdapat satu orang Tionghoa yaitu Drs. Yap Tjwan Bing. Liem Koen Hian sebagai salah satu perancang UUD 1945 dan juga delegasi dalam Perjanjian Renville serta orang yang berjasa menyeludupkan obat-obatan selama masa pendudukan Belanda untuk kepentingan Republik Indonesia meninggal sebagai orang asing di negara yang pernah ia perjuangkan karena dituduh sebagai simpatisan kiri.

Menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia, terjadi peristiwa yang sangat terkenal yaitu Peristiwa Rengasdengklok di mana Bapak Bangsa Soekarno dan Mohammad Hatta diculik oleh kelompok pemuda yang memaksa Soekarno segera memerdekakan Indonesia. Pada saat di Rengasdengklok Tentara Pembela Tanah Air (PETA) mengambil rumah seorang Tionghoa Djiaw Kie Siong sebagai tempat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Djiaw Kie Siong dengan rela rumahnya diambil oleh Tentara PETA untuk kepentingan perjuangan Indonesia. Sejatinya naskah proklamasi sudah disusun dan bendera Merah Putih sudah dikibarkan di rumah Djiaw Kie Siong di mana pada 16 Agustus 1945 naskah proklamasi akan dibacakan di rumah Djiaw Kie Siong. Tetapi Ahmad Soebardjo datang dan mengundang Soekarno dan Hatta untuk membacakan naskah itu di Jakarta. Setelah itu praktis

nama Djiaw Kie Siong tidak pernah dikenal dan tidak pernah tercatat dalam sejarah resmi pemerintah. Pada tahun 1961, tiga tahun sebelum meninggalnya Djiaw Kie Siong, Mayjen Ibrahim Adjie (Pangdam Siliwangi) pernah memberikan penghargaan kepada Djiaw Kie Siong sebagai Pembela Tanah Air.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, tidak serta merta keadaan Indonesia baik dan bebas dari tekanan asing. Belanda sebagai pemenang Perang Dunia ke-2 (walau sebenarnya kalah saat digempur Jerman) berusaha ingin mengambil kembali wilayah jajahannya di Hindia Belanda yang sempat jatuh ke tangan Jepang pada saat Perang Dunia ke-2. Usaha Belanda untuk merebut kembali Indonesia dikenal dengan peristiwa Agresi Militer Belanda atau Masa Revolusi Nasional Indonesia yaitu perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai kedaulatan, Indonesia berusaha melawan Belanda dengan segala cara. Pada masa itu banyak orang-orang Tionghoa yang turut serta dalam membela tanah air. Banyak dari mereka tidak pernah tercatat, tetapi ada satu nama yang diakui pemerintah yaitu Laksamana Muda John Lie Tjeng Tjoan yang merupakan satu-satunya Pahlawan Nasional Indonesia beretnis Tionghoa.

Laksamana Muda John Lie Tjeng Tjoan (John Lie) dengan berani mengawal kapal Indonesia menyeludupkan 800 ton karet menembus blokade kapal Belanda menuju Singapura. Karet itu lantas ditukarkan dengan senjata yang kemudian diserahkan kepada pejabat Republik untuk melawan Belanda selama Revolusi Nasional. Melalui serangkaian penyeludupannya ia berhasil menyuplai bahan bakar, makanan, senjata, dan keperluan lainnya untuk kepentingan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut Jenderal Besar Nasution, prestasi John Lie tiada taranya karena ia adalah panglima armada pada masa-masa krisis keberadaan Indonesia. John Lie juga berjasa dalam menumpas gerakan separatis RMS, PRRI/Permesta.

Dalam masa kebangkitan nasional, perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan dalam masa krisis untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, orang-orang Tionghoa juga turut berjasa dalam memberikan pengaruh dan perjuangan yang pro-nasionalis. Orang Tionghoa juga berjasa dalam mendirikan negara Indonesia dan mempertahankannya. Hal ini dilakukan karena mereka juga merasa terjajah dan tertindas serta diperlakukan diskriminatif pada masa penjajahan sama seperti orang-orang Pribumi lainnya. Adalah salah jika orang Tionghoa dituduh tidak pernah berjuang dalam memerdekakan Indonesia dan tidak pernah berjuang dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Mereka sebenarnya sungguh Indonesia.

Zaman Orde Lama

Setelah Revolusi Nasional, pada zaman Orde Lama di bawah pengaruh kuat Presiden Soekarno. Pada masa ini terdapat beberapa menteri Republik Indonesia dari keturunan Tionghoa seperti Oei Tjoe Tat (tangan kanan Presiden Soekarno kemudian dipenjara selama 12 tahun tanpa pengadilan oleh rezim Suharto), Ong Eng Die, Siaw Giok Tjhan, dan Tan Po Gwan. Walaupun beberapa orang Tionghoa duduk di pemerintahan dan hubungan orang

Tionghoa dekat dengan Soekarno, tetapi pada masa Orde Lama ini juga terdapat kebijakan yang diskriminatif terhadap orang Tionghoa. Kebijakan itu adalah kewajiban warga keturunan (terutama Tionghoa) untuk memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). SBKRI ini menyatakan pemegangnya adalah WNI. SBKRI ini harus dipenuhi sebagai syarat untuk membuat KTP, paspor, masuk dunia pendidikan, pemilu, menikah, dan lain-lain. Oleh banyak pihak SBKRI ini dianggap diskriminatif karena masih mempertanyakan status hukum WNI keturunan Tionghoa. SBKRI ini tetap ada sampai tumbanganya Orde Baru dan malah dijadikan suatu kewajiban oleh pemerintahan Orde Baru di bawah Suharto.

Kebijakan lain pada masa Orde Lama yang dinilai diskriminatif bagi WNI keturunan Tionghoa adalah Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 yang melarang orang Tionghoa yang statusnya kewarganegaraannya masih belum jelas (dianggap WNA) untuk berdagang eceran di daerah luar ibukota provinsi dan kabupaten. Hal ini menimbulkan dampak yang luas terhadap distribusi barang dan memicu keterpurukkan ekonomi Indonesia tahun 1965. Kebijakan ini juga menyebabkan banyak orang Tionghoa Indonesia di daerah-daerah tidak memiliki pekerjaan lagi dan menyebabkan banyak dari mereka kembali ke negeri leluhurnya yang sebenarnya mereka tidak kenal yaitu Tiongkok. Kerusuhan rasial terhadap orang Tionghoa pada masa ini terjadi pada tahun 1963 yang merupakan kerusuhan anti-Tionghoa terbesar di Jawa Barat yang dimulai dari keributan antara mahasiswa pribumi dan mahasiswa Tionghoa. Kerusuhan ini akhirnya menjalar kemana-mana menyerang orang Tionghoa. Selain kerusuhan rasial yang menyerang orang Tionghoa juga terjadi pada peristiwa Gerakan 30 September atau 1 Oktober tahun 1965 (G30S/Gestok). Akibat dari Gestok ini adalah pembantaian orang-orang atau simpatisan PKI termasuk orang Tionghoa yang kadang masih dianggap mengabdikan pada negara leluhurnya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diperintah oleh Partai Komunis Tiongkok.

Zaman Orde Baru

Setelah kekuasaan Presiden Soekarno jatuh, kursi kepemimpinan negara ini beralih kepada Jenderal Suharto. Sejak saat itu dimulailah periode yang paling diskriminatif terhadap orang Tionghoa di Indonesia. Tahun 1966, sekolah-sekolah Tionghoa di Indonesia mulai ditutup, setahun kemudian koran-koran berbahasa Mandarin ditutup pemerintah. Tahun 1967 sebagai tanda tahun dimulainya serangkaian larangan kepada masyarakat Tionghoa untuk mengekspresikan nilai-nilai kebudayaannya dan menjalankan agama tradisionalnya. Perayaan-perayaan yang menyangkut budaya Tionghoa dilarang dilakukan di tempat umum seperti tarian barongsai dan perayaan imlek. Agama tradisional Tionghoa seperti Kong Hu Chu dan Tao dilarang pemerintah. Begitu pula dengan penggunaan Bahasa Mandarin juga dilarang walau akhirnya diizinkan kembali oleh Kejaksaan Agung Indonesia dengan catatan bahwa orang Tionghoa berjanji tidak akan menghimpun kekuatan untuk menumbangkan pemerintah. Sekitar tahun 1967 orang-orang Tionghoa dianjurkan jika tidak mau disebut dipaksa untuk mengubah nama mereka dari nama Tionghoa dengan tiga karakter dengan nama yang lebih Indonesia. Alasan pemerintah agar masyarakat Tionghoa lebih cepat

melakukan asimilasi, padahal penggantian nama tidak bisa menjadi ukuran seseorang mengabdikan pada suatu negara atau tidak. Tahun 1969 perjanjian dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan RRT dibatalkan sehingga menyebabkan pemegang dwi kewarganegaraan menjadi *stateless*. Tahun 1978, SKBRI wajib hukumnya kepada seluruh orang Tionghoa Indonesia yang kemudian baru dicabut tahun 1996. Orang Tionghoa secara sengaja dijauhkan dari kehidupan politik Indonesia dan banyak dari mereka menghindar dari dunia politik dan hukum karena takut akan keselamatan nyawanya dan keluarganya. Akhirnya mereka banyak berkecimpung dalam dunia bisnis perdagangan. Pembatasan-pembatasan dan kebijakan diskriminatif kepada orang Tionghoa jelas mengkebiri hak-hak dasar sebagai warga negara dan secara langsung juga mencederai hak-hak asasi mereka sebagai manusia.

Pada masa Orde Baru ini banyak terjadi kerusuhan rasial yang menyerang etnis Tionghoa Indonesia. Beberapa yang besar antara lain adalah peristiwa kerusuhan 5 Agustus 1973 yang menyerang orang-orang Tionghoa dengan merusak rumah dan toko-toko milik orang Tionghoa. Kemudian peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 yang awalnya adalah demonstrasi menentang masuknya modal asing pada saat kunjungan Perdana Menteri Jepang malah menjalar menjadi penjarahan dan pembakaran toko-toko milik orang Tionghoa. Tragedi paling besar yang menimpa orang Tionghoa Indonesia adalah kerusuhan Mei 1998 yang merupakan kerusuhan anti-Tionghoa terbesar dalam sejarah berdirinya Republik. Kerusuhan tersebut terjadi di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, dan Surakarta. Kerusuhan yang awalnya disebabkan oleh jatuhnya perekonomian Indonesia dan rakyat yang sudah tidak puas dengan kepemimpinan Suharto selama 32 tahun malah beralih menjadi kerusuhan anti-Tionghoa, karena orang Tionghoa yang dicap kaya dituduh secara tidak benar sebagai penghisap kekayaan negara dan membuat masyarakat lainnya miskin. Banyak toko-toko, perusahaan, dan rumah-rumah orang Tionghoa dijarah, dihancurkan, dan dibakar oleh masa. Selain itu banyak terjadi tindakan pemerkosaan terhadap wanita-wanita Tionghoa sebelum kemudian disiksa fisiknya dan dibunuh. Banyak dari orang Tionghoa akhirnya terpaksa meninggalkan Indonesia untuk menyelamatkan diri. Sampai sekarang pemerintah tidak pernah mengambil tindakan untuk menghukum pelaku dan dalang kerusuhan rasial terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Masa Reformasi dan Pasca Reformasi

Setelah kerusuhan Mei 1998, Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Pada periode reformasi, kran demokrasi yang selama ini ditutup oleh rezim Suharto terbuka lebar. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Tionghoa yang mulai bisa menikmati kebebasan. Tahun 1999 Presiden Habibie menegaskan kembali bahwa SKBRI sudah tidak berlaku. Presiden Habibie juga menghapus kata “pribumi” dan “non-pribumi” dalam semua dokumen resmi pemerintahan dan bisnis. Langkah selanjutnya adalah menghapus larangan untuk mempelajari Bahasa Mandarin. Pada tahun yang sama Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965. Pada tahun 2000, Presiden yang baru terpilih Abdurrahman Wahid menghapuskan larangan bagi orang Tionghoa untuk mengekspresikan segala bentuk kebudayaan dan kepercayaan

Tionghoa di depan umum, sehingga memulihkan hak asasi orang Tionghoa Indonesia. Pada tahun 2003 Presiden Megawati Sukarnoputri meresmikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disahkan pada tahun 2006, di mana di dalamnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang Indonesia asli adalah mereka yang menjadi warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Menteri Hukum dan HAM pada saat itu juga menjelaskan bahwa dengan disahkannya UU No. 12/2006 ini menandakan bahwa orang Tionghoa merupakan bagian dari suku Indonesia, sehingga segala kebudayaannya diakui sebagai kebudayaan Indonesia.

Perubahan-perubahan yang dilakukan setelah reformasi memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Tionghoa. Walau tidak langsung hilang semua prasangka buruk kepada orang Tionghoa yang dibangun oleh rezim Suharto, tetapi hubungan kemasyarakatan masyarakat Tionghoa dan masyarakat lainnya relatif lebih baik. Orang Tionghoa sudah mulai diterima dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Mereka tidak dimusuhi atau dianaktirikan lagi di Indonesia, keberadaan mereka sudah diakui. Tetapi pemikiran seperti ini tidak sepenuhnya mengubah cara pandang keseluruhan masyarakat Indonesia, diskriminasi dan pernyataan berunsur SARA masih tetap ditemui hingga sekarang ini.

Dengan kebebasan dan kesetaraan yang dimiliki orang Tionghoa Indonesia sebagai WNI, memunculkan tokoh-tokoh Tionghoa baru dalam dunia politik yang turut membangun negeri ini seperti Kwik Kian Gie yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada era Presiden Megawati, Mari Elka Pangestu yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada era Presiden Yudhoyono, dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi Gubernur DKI Jakarta pertama dari etnis Tionghoa. Ahok adalah sosok Gubernur fenomenal yang terkenal karena keberaniannya mendobrak birokrasi lama yang menjadi sarang KKN dan Gubernur yang terkenal tegas dan berani demi membela rakyat kecil dari pejabat yang rakus.

Tokoh-Tokoh Tionghoa Lainnya

Tentu saja sebenarnya banyak sekali nama-nama orang Tionghoa yang berjasa dalam membangun negeri ini. Selain dari nama para pejuang dan negarawan yang telah disebutkan di atas terdapat sederet tokoh Tionghoa Indonesia yang telah berkontribusi membangun Indonesia maupun mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Mereka antara lain: Yap Thiam Hien seorang pengacara pejuang dan pembela HAM rakyat kecil pada masa Orde Lama dan Orde Baru; Liem Swi King, legenda badminton Indonesia; Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti atlet badminton Indonesia pertama yang memenangkan medali emas pada Olimpiade 1992; P.K. Ojong (Auyang Peng Koen) seorang jurnalis terkenal dan pendiri Harian Kompas; Soe Hok Gie seorang aktivis mahasiswa tahun 1960an; Yohanes Surya seorang ilmuwan fisika yang mendorong kemajuan pendidikan di Papua; Joe Taslim seorang aktor terkenal yang sudah berlaga di Hollywood; Kho Ping Ho seorang novelis yang karyanya menjadi bacaan “wajib” anak-anak era 1960-1970an; Chris John seorang petinju kelas bulu dunia; Lie Kim Hok seorang penulis yang mengembangkan sastra Melayu

Tionghoa; Gouw Giok Siong seorang pakar hukum Indonesia yang memberikan banyak sumbangan pemikiran untuk kemajuan hukum di Indonesia; Lie Eng Hok seorang perintis kemerdekaan Indonesia; Lo Siaw Ging seorang dokter yang membantu orang tidak mampu dan tidak pernah meminta bayaran atas jasanya; Ong Hok Ham seorang sejarawan dan cendekiawan Indonesia; Lie Tek Tjeng seorang penulis, sinolog, dan peneliti; dan masih banyak lagi.

Penutup

Sebuah pesan yang ingin disampaikan bahwa orang Tionghoa adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan martabat yang sederajat. Mereka tidak berbeda dengan warga negara lainnya. Mereka juga berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan negeri ini, mereka juga berjuang mempertahankan negeri ini, mereka juga berkontribusi dalam pembangunan Indonesia dan juga ikut serta mengharumkan nama Indonesia di dunia Internasional. Sesungguhnya hati dan cinta mereka sudah tertaut di negara Indonesia. Tidak ada lagi sangsi mengenai kesetiaan mereka terhadap NKRI. Bagi mereka yang masih merasa orang Tionghoa sebagai penumpang di negara ini, berkacalah apa yang sudah engkau berikan bagi kebesaran negara ini? Apakah sebanding dengan pengorbanan dan kontribusi tokoh-tokoh Tionghoa untuk kebesaran Indonesia? Untuk mereka orang keturunan Tionghoa, walau butuh perjuangan yang besar untuk tinggal di negara ini, banggalah menjadi orang Tionghoa sebab suku Tionghoa juga berjasa bagi negara ini, dan janganlah menutupi karena malu akan identitas Tionghoa, karena menjadi Tionghoa bukanlah sebuah dosa.